



**Sambutan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional**

**Rakernas Koalisi Kependudukan
Banjarmasin, 9 maret 2018**

Yang saya hormati:

1. Ibu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Ketua Umum Koalisi Kependudukan beserta segenap pengurus, baik Pusat maupun Provinsi
3. Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran Pemerintah Provinsi

4. Walikota Banjarmasin beserta jajaran Pemerintah Kota
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Para Akademisi, mitra kerja - LSOM, organisasi masyarakat, organisasi masyarakat berbasis keagamaan, organisasi profesi, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, agama dan adat, dan sektor swasta
8. Hadirin yang berbahagia

Assalammu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi

Salam sejahtera

Om swastiastu

Salam KB! Dua Anak Cukup, Bahagia Sejahtera

Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rakernas Koalisi Kependudukan Tahun 2018 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan istimewa ini, atas nama BKKBN, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum Koalisi Kependudukan dan Bapak Gubernur beserta jajaran atas dukungan komitmen terhadap Program KKBPk selama ini.

Rakernas Koalisi Kependudukan tahun ini mengangkat tema “Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Berkeadilan untuk Percepatan Pembangunan Manusia”. Sekaitan dengan itu, maka penyelenggaraan Rakernas diharapkan akan meningkatkan dukungan komitmen, koordinasi, integrasi, dan sinergitas antara

BKKBN, dan Koalisi Kependudukan dalam penerapan kebijakan dan strategi Program KKBPk di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang tingkat capaian Program KKBPk-nya belum optimal.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya banggakan,
Rakernas Koalisi Kependudukan ini dapat menjadi forum untuk meningkatkan komitmen dalam pembangunan manusia melalui program KKBPk. Selain itu, diharapkan dapat terjalin koordinasi yang sinergis antara Perwakilan BKKBN Provinsi dengan Pengurus Daerah Koalisi Kependudukan maupun mitra lainnya dalam meningkatkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) melalui kegiatan sebagai berikut:

Pertama, Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga, perlu bersinergi dengan Kegiatan dan Program Kementerian dan sektor lainnya. Saat ini, Pemerintah sedang menyusun Rancangan RKP 2019. Untuk itu hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mulai melakukan penguatan kerjasama dan kemitraan program KKBPk dengan mensinergikan berbagai kegiatan Kementerian/Lembaga terkait ke dalam lokus Kampung KB. Harapan besar ke depan keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.

Kedua, Peningkatan kualitas remaja melalui pelembagaan dan pembudayaan Program Generasi Berencana (Genre) melalui peningkatan peran serta sekolah atau kampus tempat dimana

remaja beraktifitas serta dukungan keluarga dan masyarakat.

Ketiga, Pemanfaatan data kependudukan berbasis keluarga perlu di optimalkan sebagai data basis dalam penggarapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Untuk itu penyediaan dan pemanfaatan data keluarga, hasil-hasil survei dan penelitian perlu dioptimalkan.

Keempat, Sebagai tindak lanjut proses pengalihan status PKB/PLKB maka perlu adanya percepatan penataan pengelolaan penyuluh KB dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas penyuluh KB dalam mengelola dan melaksanakan program KKBPK serta penguatan kerja lini lapangan.

Kelima, Apresiasi terhadap kerja keras seluruh pengelola dan petugas KKBPK serta mitra atas capaian TFR secara nasional yang mengalami

penurunan dari 2,6 (SDKI 2012) ke 2,4 (SDKI 2017). Namun begitu BKKBN masih perlu melakukan segmentasi sasaran penggarapan program KKBPK meskipun secara nasional TFR turun dan tetap menjaga keberlangsungan kesertaan ber-KB yang semakin berkualitas.

Keenam, Penguatan program pengasuhan orang tua dalam upaya menanggulangi gizi buruk dan pembudayaan hidup sehat dan sejahtera.

Hadirin yang terhormat,

Sebagaimana telah diketahui, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah **kewenangan wajib** yang dilaksanakan secara **konkuren (bersama-sama)** oleh pemerintah

pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Matriks N., Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB terdiri atas 4 sub-urusan, yaitu (1) pengendalian penduduk; (2) keluarga berencana; (3) pembangunan keluarga; dan (4) standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Sekaitan dengan itu, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah dimaksud dibagi ke dalam tipe berdasarkan hasil

pemetaan urusan pemerintahan, termasuk urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kelembagaan perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berbentuk dinas. Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah diharapkan dibentuk dengan nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Hadirin yang berbahagia,

Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan reformasi anggaran; “anggaran tidak harus selalu dibagi rata”. *Money follow function* harus ditinggalkan dan diubah menjadi *money follow program*. Tidak perlu banyak program/kegiatan; “konsentrasi hanya pada

program/kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh rakyat”. Ini berarti kita harus mengevaluasi kembali berbagai kegiatan agar lebih efektif dan efisien, mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi terkait *money follow program*, maka BKKBN harus lebih fokus kepada upaya untuk menurunkan angka kelahiran. Hal ini penting dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan mewujudkan Keluarga Berkualitas guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Upaya dimaksud dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK); peningkatan ketahanan keluarga, termasuk ketahanan remaja; dan pengendalian penduduk.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pula, pembangunan nasional dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan pendekatan **tematik, holistik, integratif** dan **spasial**, disingkat THIS. Dalam hal ini, Program KKBPK harus terintegrasi dan sinergis dengan program prioritas pembangunan di daerah. Hal ini karena pada era desentralisasi dukungan komitmen pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, terhadap Program KKBPK mutlak diperlukan. Untuk itu, BKKBN terus berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta mitra.

Bapak/Ibu dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana yang telah saya tegaskan berulang kali dalam berbagai kesempatan, BKKBN tidak

dapat menyelenggarakan Program KKBPK sendirian. Karena itu, kemitraan yang sinergis untuk memperkuat jejaring pelaksanaan Program KKBPK sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat secara utuh. Sekaitan dengan itu, BKKBN telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan tahun 2018 di Jakarta pada 12 Februari 2018 yang lalu.

Peran serta pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam operasionalisasi Program KKBPK pada umumnya, khususnya di Kampung KB dan daerah legok, harus dioptimalkan. Lembaga pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat memiliki pengaruh terhadap dan kedekatan yang kuat dengan masyarakat. Sementara sektor swasta, organisasi masyarakat,

organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, organisasi perempuan, dan organisasi kepemudaan merupakan bentuk peran serta masyarakat. Peran para pemangku kepentingan dan mitra kerja ini dalam upaya menyukseskan Program KKBPk harus dioptimalkan. Untuk itu, mereka harus selalu mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan dan strategi Program KKBPk. Selain itu, mereka juga perlu dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan di lini lapangan.

Bapak/Ibu dan hadirin yang berbahagia,

Koalisi kependudukan merupakan mitra yang selama ini sangat aktif bersama BKKBN terus berupaya untuk mewujudkan hal ini. Sampai saat ini, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM masih menghadapi berbagai tantangan. Selain menghadapi permasalahan terkait jumlah dan

pertumbuhan penduduk yang tinggi, dari sisi kualitas, juga masih perlu peningkatan. Hal ini karena meskipun peringkat IPM kita naik, namun dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita masih ketinggalan. Berdasarkan laporan UNDP terakhir, nilai IPM Indonesia tahun 2016 adalah 0,689 dan berada di peringkat 113 dari 188 negara. Indonesia masih tertinggal dari anggota ASEAN lainnya, yaitu: Thailand peringkat 88, Malaysia peringkat 59, Brunei 30 dan Singapura peringkat 4. Peringkat Indonesia hanya berada diatas negara Philipina peringkat 114; Vietnam peringkat 115; Kamboja peringkat 143; dan Myanmar peringkat 146.

Hadirin yang saya muliakan,

Melalui Rakernas Koalisi Kependudukan tahun 2018 ini, mari kita perkuat sinergitas lintas sektor antara BKKBN, Provinsi dan OPD Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB, serta dengan segenap pemangku kepentingan dan Koalisi Kependudukan dalam pelaksanaan Program KKBPK.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Koalisi Kependudukan yang bersama BKKBN telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan konsep yang dapat diaplikasikan secara nyata, sebagai upaya kita meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas upaya kita meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Selamat mengikuti Rakernas.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Om santi santi santi om

Plt. Kepala BKKBN,

Sigit Priohutomo